

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rendahnya mutu pendidikan di tingkat Pendidikan Tinggi tidak saja dikeluhkan oleh masyarakat, orang tua siswa, tetapi dikeluhkan juga oleh Akademisi pendidikan pada semua jenjang pendidikan, yang setiap harinya bersama-sama dengan mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran. Rendahnya mutu pendidikan yang dicerminkan dari nilai-nilai etika moral mahasiswa, ini kemungkinan disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurikulum. Masalah-masalah lain yang dihadapi di kalangan pelajar adalah seperti kasus tawuran, penodongan di angkutan umum yang dilakukan oleh sebagian pelajar, dan pemasaran narkoba yang telah memasuki di kalangan pelajar, merupakan fenomena yang banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan bila banyak tuntutan yang dialamatkan kepada sistem pendidikan untuk terus mengadakan perubahan kurikulum PKn guna lebih mendekati sistem dengan tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan tuntutan globalisasi.

Pendidikan Tinggi perlu mengantisipasi dampak global yang membawa mahasiswa berbasis pengetahuan dimana sosial-politik sangat berperan sebagai penggerak utama perubahan. Oleh karena itu, kurikulum dalam pendidikan khususnya mata kuliah PKn ini harus dikembangkan secara berkala dan berkesinambungan sejalan dengan sosial politik dan IPTEK. Perubahan yang terjadi pada kurikulum ini diharapkan dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih baik lagi. Mahasiswa sebagai generasi muda yang pada dasarnya merupakan subjek atau pelaku di dalam pergerakan pembaharuan atau subjek yang akan menjadi generasi-generasi penerus bangsa dan membangun bangsa dan tanah air ke arah yang lebih baik dituntut untuk memiliki etika. Etika bagi mahasiswa dapat menjadi alat kontrol di dalam melakukan suatu tindakan. Etika dapat menjadi gambaran bagi mahasiswa dalam mengambil suatu keputusan atau

dalam melakukan sesuatu yang baik atau yang buruk. Oleh karena itu, makna etika harus lebih dipahami kembali dan diaplikasikan di dalam lingkungan mahasiswa yang religiusnya lebih banyak mahasiswa yang tidak sadar dan tidak mengetahui makna etika dan peranan etika itu sendiri, sehingga bermunculanlah mahasiswa-mahasiswi yang tidak memiliki akhlaqul karimah.

Berdasarkan kondisi di atas, menunjukkan bahwa maka dari itu seiring bergantinya perubahan sosial dan politik maka perubahan kurikulum PKn pun perlu dilakukan, karena mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ini sebagai upaya untuk mengembangkan, menanamkan dan bisa anak didik sehingga mereka memiliki tanggung jawab untuk memahami, menghayati serta mengamalkan nilai-nilai luhur moral Pancasila ke dalam diri para peserta didik sehingga diharapkan timbul kesadaran akan pentingnya tatanan nilai moral tersebut dan keyakinan. Nilai-nilai moral tersebut dapat diterapkan dalam wujud sikap, tingkah laku dan kepribadian pelajar di dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan Perguruan Tinggi, keluarga dan masyarakat, sekaligus menjadi pedoman bagi kehidupan.

Berdasarkan konsepsi tersebut, pendidikan Tinggi/Perguruan Tinggi merupakan salah satu instrument dalam konteks pendidikan nasional dalam memprogramkan secara kurikuler PKn sebagai wadah dalam membina warga negaranya agar menjadi lebih baik dan cerdas. Oleh karena itu perguruan tinggi menjadi *setting* dalam penelitian ini karena perguruan tinggi merupakan salah satu wadah dalam membentuk warga negara yang memahami nilai-nilai etika, moral, demokratis yang berdasarkan Pancasila. Selain itu perguruan tinggi sebagai lembaga formal dipandang sebagai pintu gerbang untuk pengembangan PKn bagi mahasiswa, maka perguruan tinggi harus memiliki kekuatan dalam pengembangan kurikulum PKn. Sehingga mahasiswa selain memiliki keilmuan juga memiliki karakter yang baik.

Pendidikan kewarganegaraan sangat penting diterapkan dalam dunia pendidikan, khususnya di perguruan tinggi. Dimana pendidikan kewarganegaraan memiliki peranan yang strategis dalam mempersiapkan warga Negara yang cerdas, bertanggung jawab dan beradab. Berdasarkan rumusan Civic International, tahun 1995 (dalam Mansoer, 2005:3) disepakati bahwa:

pendidikan demokrasi penting untuk pertumbuhan *civic culture*, untuk keberhasilan pengembangan dan pemeliharaan pemerintahan demokrasi. Dengan demikian Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi saat ini dapat dijadikan sebagai sintesis antara *civic education*, *democracy education*, serta *citizenship education* yang berlandaskan filsafat Pancasila serta mengandung muatan identitas nasional Indonesia, serta muatan makna dari pendidikan pendahuluan bela Negara.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kenyataan diseluruh Negara di dunia, bahwa kesadaran demokrasi serta implementasinya harus senantiasa dikembangkan dengan basis filsafat bangsa, identitas nasional kenyataan dan pengalaman sejarah bangsa tersebut, serta dasar-dasar kemanusiaan dan keberadaban. Oleh karena itu, dengan pendidikan kewarganegaraan diharapkan para intelektual Indonesia memiliki dasar kepribadian sebagai warga negara yang demokratis, religius, berkemanusiaan dan beradab.

Akan tetapi sejarah membuktikan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia maupun di banyak negara sering mengalami penyimpangan dari visi, misi dan tujuannya. Pendidikan Kewarganegaraan sering dijadikan sebagai alat penguasa untuk melanggengkan kekuasaan. Sosok Pendidikan Kewarganegaraan yang demikian memang sering muncul di sejumlah negara, khususnya negara-negara berkembang. Penelitian Cogan (dalam Ace Suryadi dan Somantri, 2000:1) menyatakan: *“Citizenship education has often reflected the interest of those in power in particular society and thus has been a matter of indoctrination and the establishment of ideological hegemony rather than of education”*.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa visi, misi dan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan tercantum dalam kurikulum. Kurikulum dapat merencanakan hasil pendidikan atau pengajaran yang diharapkan karena dapat menunjukkan apa yang harus dilakukan dan kegiatan apa yang harus dialami oleh peserta didik. Hasil pendidikan kadang-kadang tidak dapat diketahui dengan segera atau setelah anak didik menyelesaikan program pendidikan. Pembaharuan kurikulum harus segera dilakukan sebab tidak ada kurikulum yang sesuai sepanjang masa. Kurikulum harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang senantiasa cenderung berubah.

Perubahan kurikulum di Indonesia sering terjadi seiring berubahnya zaman dikarenakan adanya perubahan politik dan sosial. Tetapi upaya sentralnya kurang berporos pada pembaharuan kurikulum pendidikan yang diperlukan pada saat ini. Sebagai usaha terencana, pembaharuan kurikulum tentu didasari oleh alasan yang jelas dan substantif serta mengarah pada pembaharuan kurikulum selayaknya diabadikan pada terwujudnya sosok kurikulum yang lebih baik, dalam arti yang seluas-luasnya, bukan sekedar demi perubahan itu sendiri. Ini berarti pembaharuan kurikulum selayaknya diabadikan pada terwujudnya praktik pembelajaran yang lebih berkualitas bagi mahasiswa, menuju terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, baik dalam kaitannya dengan studi lanjut, memasuki dunia kerja, maupun belajar sendiri.

Hal ini sejalan dengan Nasution (dalam Fajar Siddiq 2013:2) yang menyatakan bahwa:

perubahan kurikulum mengenai tujuan maupun alat-alat atau cara-cara untuk mencapai tujuan itu. Pada dasarnya mengubah kurikulum sama halnya mengubah manusia yang terlibat sebagai peragaan kurikulum. Oleh sebabnya perubahan kurikulum dianggap sebagai perubahan social (*social change*).”

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perubahan kurikulum, berbagai pihak menganalisis dan melihat perlunya diterapkan kurikulum terhadap perubahan sosial, yang dapat membekali peserta didik dengan berbagai kemampuan yang sesuai dengan tuntutan jaman dan tuntutan reformasi, guna menjawab tantangan arus globalisasi, berkontribusi pada pembangunan masyarakat dan kesejahteraan sosial, lentur dan adaptif terhadap berbagai perubahan. Oleh karena itu, perubahan kurikulum PKn yang terus menerus berganti menjadi fenomena yang memiliki dampak tersendiri dari berbagai pihak penyelenggara pendidikan di Perguruan Tinggi, baik warga Universitas yaitu Rektor, Dosen dan mahasiswa, maupun warga di luar Perguruan Tinggi yaitu orang tua, akademisi, dan pihak-pihak lain. Sebagai instrumen peningkatan mutu pendidikan, kurikulum selalu melakukan perubahan-perubahan yang bertujuan melakukan perbaikan, pengembangan dan pelengkap dari kurikulum terdahulu.

Perubahan yang mencolok adalah pada perubahan kurikulumnya, yang sejak tahun 1945 sampai dengan era reformasi telah mengalami perubahan sebanyak enam kali; suatu perubahan yang dapat dikatakan sering.

Dengan terjadinya perubahan kurikulum Perguruan Tinggi yang sudah beberapa kali itu sangat menarik untuk diketahui terdapat tidaknya sosok program Pendidikan Kewarganegaraan pada setiap kurikulum Perguruan Tinggi tersebut dan bagaimana pula wujud atau bentuk programnya, serta faktor-faktor apa pula yang melatarbelakangi perubahan-perubahannya. Terjadinya perubahan-perubahan kurikulum Perguruan Tinggi sejak tahun Orde Lama, yang diperkirakan membawa perubahan pada program pendidikan Kewarganegaraan inilah yang merupakan latar belakang paling pokok dari penelitian ini.

Untuk dunia perguruan tinggi pengembangan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan, menurut Sapriya (2007:2) bahwa upaya Pendidikan Kewarganegaraan belumlah optimal dan mencapai harapan. Bahkan hingga saat ini program pendidikan ini dipertanyakan keberadaan dan kenyataannya. Pada bagian lain Winataputra (2007:165) mengungkapkan bahwa

dari analisis terhadap perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia sampai dengan saat ini, dapat dikatakan bahwa baik dalam tataran konseptual maupun dalam tataran praksis terdapat kelemahan paradigmatis yang sangat mendasar. Kelemahannya adalah dalam konseptualisasi pendidikan kewarganegaraan, penekanan yang sangat berlebihan terhadap proses pendidikan moral yang *behavioristik*, ketidakkonsistenan penjabaran dimensi tujuan pendidikan nasional ke dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan, dan keterisolasian proses pembelajaran nilai Pancasila dengan konteks disiplin keilmuan dan sosial-budaya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa seperti yang sudah menjadi realitas pendidikan PKn sekarang di negeri ini, dunia pendidikan seakan masih mencari jati diri yang tepat dan tampaknya masih kebingungan dalam mendapatkan format yang pas untuk mengembangkan dunia pendidikan ke arah yang lebih baik. Dampaknya, pencarian format ini terkesan menimbulkan masalah baru yang terjadi di tataran praksis pendidikan, dimana anak didik dan pendidik dibuat bingung dengan serangkaian kebijakan pendidikan sudah dikaitkan dengan dunia politik, setiap ada pergantian pemerintahan, berganti pula kebijakan

pendidikan yang ada. Akibatnya, pendidikan di negeri ini tentu tidak pernah mampu mencapai format yang baku dan mampu memberikan konsistensi belajar mengajar dalam tataran praksis, yakni para pelaku pendidikan itu sendiri.

Hal ini sejalan dengan Idi (dalam Sopyana, 2013: 16) yang menyatakan bahwa:

inkonsestensi kebijakan tentu akan berdampak pada output pendidikan itu sendiri. Karena kebijakan tidak pernah jelas, output pendidikan pun pasti akan semakin tidak menentu. Pengembangan rencana pembelajaran dan pelaksanaan bimbingan merupakan bagian dari isi kurikulum, isi kurikulum bukan hanya mata pelajaran saja, tetapi ditambah dengan proses pembelajaran di luar mata pelajaran misalnya kerja keras, kedisiplinan, kebiasaan belajar, dan jujur dalam belajar. Semua itu merupakan tanggung jawab sekolah yang wajib diberikan kepada peserta didik.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa perubahan kurikulum yang ada di berbagai negara tidak pernah lepas dari kondisi politik yang sedang berlaku di negara tersebut. Untuk itu, tidak menutup kemungkinan kurikulum akan berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi politik yang memengaruhi negara pada saat itu. Dalam konteks nasional, kebijakan perubahan kurikulum merupakan politik pendidikan yang berkaitan dengan kepentingan berbagai pihak, bahkan pelaksanaannya seringkali dipolitisir untuk kepentingan kekuasaan.

Perubahan kurikulum PKn juga akan berdampak pada komponen isi materi, tujuan dan makna dari pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Besarnya kepentingan rezim kekuasaan terhadap Pendidikan Kewarganegaraan, mengakibatkan terjadinya reduksionisme misi mata kajian itu dalam kerangka membentuk warga negara yang baik. Reduksi itu nampak ketika Pendidikan Kewarganegaraan yang dieksplisitkan dengan beberapa perubahan nama dan makna dan tujuan, seakan-akan menjadi satusatunya mata pelajaran yang harus bertanggung jawab terhadap pembentukan karakter warga negara, khususnya kepada generasi muda.

Oleh karena itu walaupun adanya perubahan kurikulum dalam Pendidikan Kewarganegaraan, tujuan dari PKn harus tetap sesuai, tidak boleh di indoktrinasi

oleh pemegang kekuasaan. Hal ini sejalan dengan Wahab dan Sapriya (2011:305) mengemukakan bahwa:

dalam era reformasi dan dalam kehidupan demokrasi setiap warga negara memperoleh kebebasan dan diperlakukan secara adil, untuk itu setiap warga negara harus memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan dengan baik.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa secara konseptual Pendidikan Kewarganegaraan di era reformasi bertujuan untuk menyiapkan generasi muda menjadi warga negara yang baik, warga negara yang memiliki pengetahuan, kecakapan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakatnya. Pendidikan Kewarganegaraan tidak boleh semata-mata menjadi alat kepentingan kekuasaan rezim, tetapi harus mendasarkan diri pada politik negara sebagaimana dimuat dalam konstitusi nasional. Pendidikan Kewarganegaraan juga bertujuan agar warga negara paham terhadap politik, menumbuhkan sikap demokratis dan ideologi negara, serta untuk membangun sikap patriotik dari warga negara bagi bangsanya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penelitian ini hendak mengkaji, **Perkembangan Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Dinamika Sosial Politik Pada Jenjang Perguruan Tinggi**. Oleh karena itu penelitian ini penting untuk dilakukan, agar berkontribusi pada pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia khususnya, dan pengembangan ilmu pendidikan pada umumnya.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Perubahan sosial politik di Indonesia juga berdampak pada perubahan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan yang sering tidak sesuai dengan tujuan PKN dan politik negara dan bangsa yang ada dalam konstitusi
2. Dengan perubahan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia sering lepas dari bingkai filosofi Pancasila.

3. Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia kurang ditujukan untuk memberdayakan warga negara, tapi lebih ditujukan untuk membentuk kepatuhan tanpa daya kritis.
4. Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan yang tepat bagi Indonesia harus dicari formulasinya.

C. RUMUSAN MASALAH

Perumusan Masalah Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perkembangan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan pada jenjang Perguruan Tinggi?
2. Bagaimanakah perkembangan makna Pendidikan Kewarganegaraan pada jenjang Perguruan Tinggi?
3. Bagaimana dampak dinamika sosial politik terhadap perkembangan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di jenjang Perguruan Tinggi?

D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini ialah untuk menemukan perubahan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan dalam dinamika sosial politik, dan dinamika makna Pendidikan Kewarganegaraan pada jenjang Perguruan Tinggi di Indonesia. Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi perkembangan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan pada jenjang Perguruan Tinggi
2. Menemukan perkembangan makna Pendidikan Kewarganegaraan pada jenjang Perguruan Tinggi.
3. Mengidentifikasi dampak dampak dinamika sosial politik terhadap perkembangan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di jenjang Perguruan Tinggi.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis:

1. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori pendidikan yang terkait dengan Pendidikan Kewarganegaraan yang tepat bagi Indonesia, yang selama ini masih sangat dipengaruhi oleh kepentingan rezim yang sedang berkuasa.
2. Penelitian ini memperkuat kajian tentang perubahan Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan yang relatif masih langka dan belum banyak diminati di Indonesia.
3. Penelitian ini juga diharapkan dapat merangsang penelitian lain untuk dilakukannya penelitian yang lebih mendalam dan menyeluruh terhadap Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia.

Manfaat Praktis:

1. Memberi gambaran kepada pengambil kebijakan pendidikan di berbagai tingkatan baik pusat maupun daerah, dalam upaya mengambil kebijakan yang tepat terkait dengan Pendidikan Kewarganegaraan.
2. Memberi gambaran kepada para Dosen di lapangan, tentang dinamika Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia agar para dosen bisa lebih kritis, bersikap ilmiah, dan tidak terjebak pada kepentingan rezim dalam mengajarkan Pendidikan Kewarganegaraan kepada mahasiswanya.
3. Memberi gambaran kepada para ahli dan pakar, untuk ikut terus memikirkan dan mengembangkan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan yang tepat bagi Indonesia.
4. Memberi gambaran kepada masyarakat tentang dinamika Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia, yang selama ini telah diajarkan di Perguruan Tinggi, sehingga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ambil bagian dalam mengevaluasi penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan tinggi.

F. Definisi Operasional

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan terarah terhadap masalah yang diteliti, perlu diberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan dalam penelitian ini adalah perkembangan, perubahan, dan pergeseran makna Pendidikan Kewarganegaraan yang dilakukan lewat pendidikan formal di jenjang Perguruan Tinggi.
2. Pendidikan Kewarganegaraan dalam penelitian ini diartikan sebagai keseluruhan program kurikuler yang dilakukan dalam pendidikan untuk jenjang Perguruan Tinggi sebagai upaya untuk mendidik anak dan pemuda peserta belajar menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyebutan Pendidikan Kewarganegaraan di dalam kurikulum pendidikan perkuliahan mengalami perubahan dari waktu ke waktu, sesuai dengan perkembangan atau dinamika kehidupan berpolitik dalam membangun bangsa dan masyarakat.
3. Dinamika makna Pendidikan Kewarganegaraan pada setiap era, dikaji perkembangan, perubahan, dan pergeserannya dari sisi sosial politik, dan kurikulum.
4. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di perguruan tinggi. Kurikulum terdiri atas Kurikulum Inti dan kurikulum Institusional. Kurikulum Inti merupakan penciri dari kompetensi utama, ditetapkan oleh kalangan perguruan tinggi bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan. Sedangkan Kompetensi pendukung, dan kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama suatu program studi ditetapkan oleh institusi penyelenggara program studi.